

**ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN PIUTANG DALAM MEMINIMALISIR
PIUTANG MACET PADA PT PLN (PERSERO) UP3 TANJUNG KARANG**

Khairudin^{1*}, Iskandar Ali Alam², Kania Senja Pangestu³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung^{1,2,3}

E-mail Penulis Korespondensi: khairudin@ubl.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan piutang penting bagi entitas karena dapat berdampak positif pada efektivitas arus kas, peningkatan profitabilitas, peningkatan likuiditas, dan peningkatan kinerja keuangan entitas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai strategi pengelolaan piutang untuk meminimalisasi piutang macet di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara menganalisis strategi pengelolaan piutang PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang meliputi analisis atas standar kredit, persyaratan kredit, kebijakan pengumpulan piutang, dan rasio pengukuran piutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa entitas telah memiliki strategi pengelolaan piutang yang baik, yang ditunjukkan dengan adanya standar kredit dan persyaratan kredit yang jelas dan berlaku secara nasional, adanya penerapan kebijakan pengumpulan piutang yang berdampak positif pada rasio pengukuran piutang yang baik. Kondisi ini tentunya harus dipertahankan/ditingkatkan dengan cara (1) meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk selalu melaksanakan pekerjaan sesuai SOP yang ada; (2) melakukan kegiatan grebek tunggakan yang berkolaborasi dengan seluruh pegawai terkait; dan (3) meningkatkan program migrasi listrik pascabayar ke Prabayar.

Kata kunci: Strategi Pengelolaan Piutang, Piutang Macet

ABSTRACT

Management of receivables is important for the entity because it can have a positive impact on the effectiveness of cash flow, increase profitability, increase liquidity, and improve financial performance of the entity. This study aims to assess the receivable management strategy to minimize bad debts in the future. This study uses a qualitative method by analyzing the receivable management strategy of PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang including analysis of credit standards, credit requirements, receivable collection policies, and receivable measurement ratios. The results show that the entity has a good receivables management strategy, which is indicated by the existence of clear and nationally applicable credit standards and credit requirements, the implementation of receivables collection policies that have a positive impact on good receivables measurement ratios. This condition must be maintained/improved by (1) increasing the commitment of all employees to always carry out work according to existing SOPs; (2) carry out raids on arrears in collaboration with all relevant employees; and (3) increasing the postpaid to prepaid electricity migration program.

Keywords: Receivable Management Strategy, Bad Debts

diterima	1 Juli 2022	direview	11 November 2022	diterbitkan	29 November 2022
----------	-------------	----------	------------------	-------------	------------------

I. PENDAHULUAN

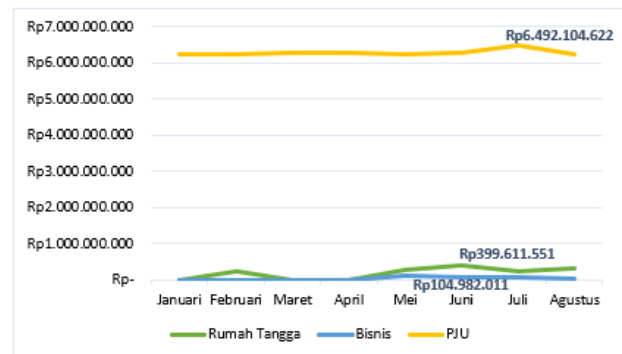
PT PLN (Persero) merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola seluruh hal terkait ketenagalistrikan di Indonesia (Pedoman Perilaku Dan Etika Bisnis PLN, 2021). Implementasi pendistribusian tenaga listrik PT PLN (Persero) dibantu oleh unit maupun sub unitnya yang berada di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya ialah PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang (Warganegara & Septiadi, 2021).

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kualitas atau nilai perusahaan salah satunya ialah kinerja keuangan (Muliani *et al.*, 2014). Kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai hasil operasi perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan dalam periode tertentu, dan pada dasarnya merupakan cerminan dari kinerja manajemen pada periode tersebut (Febriyanto, 2019). Kinerja keuangan yang baik dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengelola piutang (Tiong, 2017). Piutang merupakan bentuk penjualan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap (Nugraha, 2019). Pengelolaan piutang penting bagi perusahaan karena perputaran piutang berpengaruh terhadap efektivitas arus kas (Indriani *et al.*, 2017), peningkatan profitabilitas (Tiong, 2017), peningkatan likuiditas (Indriani *et al.*, 2017) dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan (Suprihatin & Nasser, 2016).

Namun, PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang mencatat masih terdapat banyak pelanggan yang kurang bertanggung jawab terhadap kewajibannya, yaitu tidak membayarkan rekening tagihan listriknya secara tepat waktu sehingga menimbulkan piutang macet pada perusahaan. Piutang macet menjadi salah satu permasalahan serius bagi perusahaan, sebab dapat memicu timbulnya kesulitan keuangan (*financial*

distress) yang nantinya akan mempengaruhi kinerja perusahaan (Amna, *et al.*, 2021).

Berikut riwayat data pergerakan piutang macetnya:



Sumber: Sistem AP2T PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang 2021

Gambar 1. Grafik Jumlah Rupiah Piutang Macet PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang

Berdasarkan data di atas menunjukkan piutang macet golongan rumah tangga, bisnis dan PJU tersebut mengalami fluktuasi. Golongan rumah tangga peningkatan piutang macet secara signifikan terjadi di bulan Juni sebesar Rp 399.611.551. Golongan bisnis peningkatan piutang macet secara signifikan terjadi di bulan Mei sebesar Rp 104.982.011. Sedangkan untuk golongan PJU, peningkatan piutang secara signifikan terjadi di bulan Juli sebesar Rp 6.492.104.622. Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah strategi pengelolaan piutang PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang dalam upaya meminimalisir kredit macet. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai strategi pengelolaan piutang dalam upaya meminimalisasi piutang macet di kemudian hari.

Definisi Strategi

Menurut (Fred & Forest, 2016) strategi ialah tindakan yang berasal dari keputusan *top management* dan sumber daya milik perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjangnya (*long-term objectives*).

Pengelolaan Piutang

Ardiprawiro, (2015) menyatakan pengelolaan piutang terdiri dari:

- a. Standar kredit, ditujukan untuk menentukan kesediaan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan untuk meminimalkan resiko kredit macet.
- b. Persyaratan kredit, bertujuan terhadap peningkatan penjualan kredit serta mendorong pelanggan untuk segera melakukan pembayaran tagihan kreditnya.
- c. Kebijakan pengumpulan piutang
 - 1) Mengingatkan pelanggan untuk melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo melalui surat atau telepon.
 - 2) Kunjungan secara langsung kerumah pelanggan.
 - 3) Melakukan penagihan menggunakan pihak ketiga.
 - 4) Tindakan hukum atau perdata.
- d. Rasio pengukuran piutang
 - 1) Rasio Perputaran Piutang (Receivable Turnover).
Alat ukur terkait aktivitas piutang selama satu periode.
 - 2) Rasio Rata-rata Umur Piutang digunakan dalam menghitung hari rata-rata pengumpulan piutang atau penagihan.
 - 3) Rasio Tunggalan
Alat ukur dalam menentukan jumlah piutang dari serangkaian penjualan kredit yang tidak tertagih.
 - 4) Rasio Penagihan
Alat ukur pada perhitungan terkait aktivitas penagihan yang dilakukan perusahaan.

Piutang

Harrison *et al.*, (2014) “Piutang (*receivable*) adalah tuntutan akan kewajiban atas keuangan terhadap pihak lain. Piutang diperoleh melalui penjualan barang atau jasa dan peminjaman uang kepada pihak lain”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, berikut pengkategorinya:

- a. Piutang penerimaan negara bukan pajak
- b. Piutang pajak yang meliputi piutang di bidang:
 - 1) Perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - 2) Kepabeanan dan cukai yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- c. Piutang lainnya.

Piutang Macet

Menurut Sara (2016) “Piutang tak tertagih atau piutang macet berasal dari pemberian jasa kepada langganan yang karena sesuatu hal menyebabkan piutang tersebut tidak dapat ditagih lagi”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, yaitu penyisihan piutang tidak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar 0,5%.

Dampak Piutang Macet Terhadap Perusahaan

Paramita (2019) dampak adanya piutang macet sebagai berikut:

- 1) Menurunnya profitabilitas
- 2) Meningkatkan kerugian
- 3) Menurunnya kualitas perusahaan

- 4) Menurunnya kesejahteraan anggota perusahaan

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara menganalisis strategi pengelolaan piutang PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang dalam upaya meminimalisir kredit macet, meliputi analisis atas standar kredit, persyaratan kredit, kebijakan pengumpulan piutang, dan rasio pengukuran piutang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan penting untuk melakukan pengelolaan terhadap piutang, sebab bertujuan untuk menjaga keberadaan maupun keberlangsungan perusahaan, serta agar dapat meminimalisasikan risiko atau permasalahan yang nantinya akan memberikan dampak buruk terhadap perusahaan dikemudian hari.

Hasil penelitian diketahui bahwa piutang macet pada PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang tahun 2020 ialah 0,6% dan tahun 2021 ialah 0,3% (terlampir pada tabel 4.4). Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup perusahaan, kinerja perusahaan, serta sebagai salah satu upaya dalam meminimalisasi risiko piutang macet, PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang melakukan strategi pengelolaan piutang sebagai berikut:

Standar Kredit

Penentuan standar kredit pada PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang berbeda dengan bank atau perusahaan barang lain yang dalam pelaksanaan penilaian calon pelanggannya menggunakan unsur 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*). Meskipun dalam penentuan standar kredit tersebut

berbeda, tujuannya tetaplah sama, yakni untuk mengetahui kemauan dan kemampuan pelanggan dalam melunasi kewajibannya.

Standar kredit yang digunakan berupa tagihan listrik yang setiap bulannya diterbitkan kepada pelanggan pascabayar atas pemakaian tenaga listrik di bulan sebelumnya. Tagihan listrik tersebut meliputi: 1) Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (RPTL), yang murni didapatkan dari hasil pemakaian tenaga listrik pelanggan; 2) Pajak Penerangan Jalan (PPJ), yaitu pajak yang diambil Pemerintah Daerah dari masyarakat untuk Penerangan Jalan Umum (PJU); 3) Bea materai, ialah pajak yang dikenakan Pemerintah Pusat atas transaksi keuangan.

Persyaratan Kredit

Persyaratan kredit pada PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pelanggan PLN. Perusahaan menentukan persyaratan tersebut dan mencetaknya dalam bentuk Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dimana setiap pemohon kredit wajib menandatangani sebelum menjadi pelanggan PLN. Persyaratan krediter sebut meliputi:

- 1) Uang Jaminan Langganan (UJL), besaran jumlah UJL disesuaikan dengan golongan tariff atau besaran daya yang dipilih pelanggan, yang artinya semakin besar daya, maka semakin besar pula jumlah UJL. UJL tersebut dimaksudkan apabila pelanggan mengalami wanprestasi terhadap kewajibannya dalam membayar tagihan listrik, sehingga PLN terpaksa melakukan pembongkaran rampung dan mengubah status pelanggan tersebut menjadi non-aktif.
- 2) Pembayaran Tagihan

Pelanggan diwajibkan untuk membayar tagihan rekening listrik maksimal tanggal 20 setiap bulannya.

- 3) Sanksi atau denda keterlambatan
Berikut sanksi apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran:
 - a) PLN berhak untuk memberikan surat peringatan atau melakukan pemutusan sementara, apabila pelanggan melewati batas waktu pembayaran.
 - b) PLN berhak melakukan pembongkaran rampung, apabila dalam 60 hari setelah pemutusan sementara tersebut tagihan tetap belum dilunasi pelanggan.
 - c) Apabila setelah dilakukan bongkar rampung, sambungan listrik diinginkan kembali oleh pelanggan maka sebelumnya pelanggan harus melunasi tunggakan miliknya tersebut dan nantinya akan dianggap menjadi permohonan dalam sambungan baru.

Berikut rincian besaran denda keterlambatan:

Tabel 1. Besaran Biaya Keterlambatan

Daya	Biaya Keterlambatan (Rp/Bulan)
450-900 VA	3.000
1.300 VA	5.000
2.200-3.500 VA	10.000
3.500-5.500 VA	50.000
6.600-14.000 VA	3% dari tagihan rekening listrik (minimal 75.000)
Diatas 14.000 VA	3% dari tagihan rekening listrik (minimal 100.000)

Sumber: Peraturan Menteri ESDM No.27/2017

Kebijakan Pengumpulan Piutang

Pengelolaan piutang, PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang menerapkan kebijakan pengumpulan piutang sebagai berikut:

- 1) Melakukan *reminder* kepada pelanggan dengan kategori tagihan lancar agar melakukan pembayaran

tagihan tepat waktu, yaitu sebelum tanggal 20, melalui sosial media PLN, aplikasi PLN Mobile, maupun SMS Blasting. Pada SMS Blasting nomor telepon pelanggan didapat dari petugas Biller yang melakukan penagihan atau hasil *collecting* nomor telepon ketika pelanggan melakukan pengaduan.

- 2) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, lewat tanggal 20, maka petugas Biller akan memberikan surat peringatan pertama.
- 3) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, lewat 2 bulan, maka petugas Biller akan melakukan penagihan langsung ke lokasi pelanggan, kemudian melakukan pemutusan sementara dan pelanggan tidak boleh menikmati aliran listrik tersebut sampai kewajibannya terlunasi.
- 4) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, lewat 3 bulan, maka petugas PLN akan melakukan pembongkaran rampung dan status pelanggan tersebut diubah menjadi non pelanggan.
- 5) Apabila pelanggan menginginkan sambungan listrik kembali setelah pembongkaran rampung dilakukan, maka pelanggan harus terlebih dahulu melunasi tunggakannya dan akan dianggap sebagai permintaan sambungan baru.

Rasio Pengukuran Piutang

- 1) Perputaran Piutang
Perputaran piutang diukur menggunakan rumus penjualan kredit dibagi rata-rata piutang (Ardiprawiro, 2015). Hasil perhitungan perputaran piutang seperti tabel 2 berikut:

Tabel 2. Perputaran Piutang

Tahun	Penjualan Kredit (Rp)	Rata-Rata Piutang (Rp)	Perputaran Piutang
2020	13.070.313.728.373	172.979.563.868	75,55
2021	15.090.886.660.744	147.418.906.770	102,36

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang tahun 2020 perputaran piutangnya sebanyak 75,55 kali dan tahun 2021 sebanyak 102,36 kali. Ukuran standar minimal perputaran piutang dikelompokkan menjadi 3 yaitu: < 10 (rendah), 10-15 (cukup/sedang), > 15 (tinggi) dan rata-rata pada industri dalam melakukan *receivable turnover* tersebut yaitu 15 kali (Daryati, 2021). Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang tersebut dianggap tinggi dan efektif karena dilakukan lebih dari 15 kali.

2) Rata-Rata Umur Piutang

Rata-rata umur piutang dirumuskan dengan 360 dibagi tingkat perputaran piutang (Ardiprawiro, 2015). Hasil perhitungan rata-rata umur piutang seperti tabel 3 berikut:

Tabel 3. Rata-Rata Umur Piutang

Tahun	Waktu	Perputaran Piutang	Rata-Rata Umur Piutang
2020	360	76	4,7
2021	360	102	3,5

Sumber: Data Diolah, 2022

Hasil perhitungan ACP PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang tahun 2020 adalah 4,7 hari dan tahun 2021 adalah 3,5 hari, sedangkan menurut Suryana *et al.*, (2015) rata-rata industri dalam melakukan penagihan piutang adalah 60 hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pengumpulan piutang telah dilakukan dengan baik, sebab durasi yang dibutuhkan untuk merubah piutang menjadi kas lebih cepat dari rata-rata industri yang ada dan dari tahun sebelumnya.

3) Rasio Tunggakan

Rasio tunggakan dirumuskan dengan total piutang tak tertagih dibagi dengan penjualan kredit dikali 100% (Mitayani, 2016). Hasil perhitungan rasio tunggakan seperti tabel 4 berikut:

Tabel 4. Rasio Tunggakan

Tahun	Total Piutang Tak Tertagih	Penjualan Kredit	RT
2020	8.021.132.705	13.070.313.728	0,6%
2021	3.925.820.927	15.090.866.660	0,3%

Sumber: Data Diolah, 2022

Hasil rasio tunggakan di PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang di tahun 2020 sebanyak 0,6% dan 2021 sebanyak 0,3%. Artinya jumlah piutang tertunggak tahun 2021 berada dalam kategori rendah dan baik, bila dibandingkan dengan jumlah di tahun sebelumnya dan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010.

4) Rasio Penagihan

Rasio penagihan dirumuskan dengan total piutang tertagih dibagi total piutang dikali 100% (Mitayani, 2016). Hasil perhitungan rata-rata umur piutang seperti tabel 5 berikut:

Tabel 5. Rasio Penagihan

Tahun	Total Piutang Tertagih	Total Piutang	RP
2020	13.062.292.595	13.070.313.728	99%
2021	15.088.337.802	15.090.866.660	99%

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 5 menunjukkan rasio penagihan PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang tahun 2020-2021 adalah sebesar 99%. Hal ini dapat diartikan bahwa penagihan piutang berjalan dengan dengan baik, dimana rata-rata persentase penagihannya hampir 100% atau di atas 90% semua.

Dampak Piutang Macet Terhadap PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang

Seluruh piutang dan pendapatan tercatat dalam laporan akuntansi. Namun, terlebih dahulu diolah menjadi laporan keuangan melalui aplikasi AP2T. Berdasarkan laporan keuangan tersebut diperoleh hasil perhitungan jumlah piutang dan pendapatan perusahaan, yang kemudian dicatat oleh bagian akuntansi. Selain itu, besaran piutang macet dapat diketahui melalui laporan keuangan tersebut.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, menyebutkan bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Oleh sebab itu, besar kecilnya persentase atau jumlah piutang macet tersebut tetap akan membebankan perusahaan, sebab PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang juga sebagai salah satu BUMN, dimana apabila terdapat piutang macet pada perusahaan, maka akan sangat berdampak terhadap pendapatan perusahaan, efektivitas pengelolaan piutang, kinerja PLN secara korporat, serta pendapatan negara.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang telah memiliki strategi pengelolaan piutang yang baik, dimana entitas telah menggunakan standar kredit dan persyaratan kredit yang jelas dan berlaku secara nasional. Selain itu entitas juga telah menerapkan kebijakan pengumpulan piutang yang baik, dan berdampak pada rasio pengukuran piutang yang baik. Kondisi ini tentunya harus pertahankan bahkan ditingkatkan dengan cara (1) meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk selalu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ada; (2) melakukan kegiatan grebek tunggakan yang berkolaborasi dengan seluruh pegawai terkait; dan (3) meningkatkan program migrasi listrik pascabayar ke Prabayar

DAFTAR PUSTAKA

Amna, L.,S., Aminah, A., Khairudin, K.,

Soedarsa, H., G., & Pribadi, H. K. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Financial Distress. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 88-99.

Ardiprawiro. (2015). *Dasar Manajemen Keuangan*. Universitas Gunadarma. Jakarta.

Daryati, E. (2021). Efektivitas Pengelolaan Piutang, Pengendalian Piutang, dan Perputaran Piutang pada Koperasi Sagurisi Kabupaten Bungo. *Jurnal Manajemen Sains*, 1(2), 146–153.

Fred, R. D., & Forest, R. D. (2016). *Manajemen Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Penerbit Salemba. Jakarta.

Harrison, W. T., Horngren, C. T., & Thomas, C. W. (2014). *Financial Accounting*. Pearson Education. New York.

Indriani, D., Ilat, V., & Suwetja, I. (2017). Pengaruh Perputaran Piutang dan Arus Kas Terhadap Likuiditas PT. Astra Internasional.Tbk. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 136–144.

Mitayani, D. (2016). Analisis Piutang Tak Tertagih Terhadap Tingkat Perputaran Piutang Pada CV. Berlian Abadi Di Surabaya. *Doctoral Dissertation Universitas Narotama*.

Muliani, L. E., Yuniarti, G. A., & Sinarwati, K. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responcibility dan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1), 1–10.

Nugraha, A. P. (2019). Analisis Pengaruh Piutang Tak Tertagih Terhadap Profitabilitas Pada Cabang PT. Mino Perkasa Motor Di Tanjung Balai Karimun. *Khazanah Ilmu Berazam* 2, 149–159.

Oktaviani, E. B. (2019). Analisis Kinerja

Derivatif : Jurnal Manajemen

Vol. 16 No. 2 November 2022

(ISSN Cetak 1978-6573) (ISSN Online 2477-300X)

- Keuangan Dengan Pendekatan Rasio (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk.). GEMA: Jurnal Gentiaras Manajemen dan Akuntansi, 11(2), 108-116.
- Piutang terhadap Profitabilitas pada Perusahaan PT Mitra Phinastika Mustika Tbk. *Journal of Management & Business*, 1(1), 1–22.
- Paramita, E. (2019). Analisis Penyebab Piutang Tak Tertagih dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Unit Corn Dryer Gowa Financial and Accounting Departement. *Doctoral Dissertation Nobel Indonesia Institute*.
- PT. PLN. (2021). *Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis PLN*.
- Warganegara, T., L., P., & Septiadi., S. (2021). Analisis Pengambilan Keputusan Strategi Peningkatan Penjualan Dalam Upaya Pencapaian Target Pada PT PLN (Persero) UP3 Tanjung Karang. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 219-228.
- Sara, K. (2016). Pengelolaan Piutang Ragu-Ragu Pada PT. PLN (Persero) Rayon Medan Selatan. *Jurnal Ekonomi*, 2(1), 41–49.
- Suprihatin, N., & Nasser, E. (2016). Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang Usaha, Perputaran Persediaan Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 66–83.
- Suryana, K., D., Sinarwati, N., K., & Sulindawati, N. L. (2015). Analisis Tingkat Perputaran Piutang Dagang Pada Koperasi Tani Tumpang Sari Pada Periode 2011-2013. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1) 54-69.
- Tiong, P. (2017). Pengaruh Perputaran